

## SINOPSIS

Terjadinya pergeseran konsep penyelenggaraan pemerintah dari konsep *government* ke konsep *governance* menimbulkan kebutuhan untuk melakukan pembaharuan tata pemerintahan, menuju tata pemerintahan yang berkiblat pada masyarakat, atau populer di sebut tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Alasan penyusun mengadakan skripsi adalah berdasarkan usaha pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur guna menarik minat investor agar mau menanamkan modalnya di daerah ini serta kesiapan pemerintah dalam menciptakan iklim yang kondusif, agar pembangunan dapat berjalan dengan baik serta menyentuh ke segala lapisan masyarakat, untuk mewujudkannya diperlukan strategi yang matang dari Pemerintah Kabupaten Natuna beberapa alasan di atas menimbulkan ketertarikan penulis guna meneliti hal tersebut, oleh karena itu maka rumusan masalahnya adalah “Bagaimana Strategi Pemerintah dalam mewujudkan *Good Governance* di Kabupaten Natuna?”

Jenis penelitian yaitu deskriptif kualitatif yaitu dengan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau pelaku yang diamati. Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan yakni deskriptif kualitatif adalah memutuskan dan menafsirkan data yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian maka dijelaskan bahwa dari aspek partisipasi dapat dikatakan cukup baik, masyarakat sudah cukup tanggap terhadap jalannya pembangunan, sistem *Bottom Up* terlihat mulai dijalankan, skala prioritas dari pembangunan menjadi faktor yang harus dipahami masyarakat sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan. Dari aspek transparansi dapat dikatakan belum baik ini terlihat dari akses masyarakat terhadap informasi mengenai jalannya pemerintahan, selain koran-koran daerah yang cukup minim, satu-satunya alat komunikasi yang *intens* di gunakan hanya melalui radio. Bila di lihat dari aspek akuntabilitas dapat dikatakan belum baik hal ini dapat dilihat dari LAKIP yang tidak bisa di akses masyarakat. Dari Aspek Keadilan dapat dikatakan belum baik, ini terlihat dengan banyaknya kebijakan yang tidak dapat dijalankan di lapangan, serta belum adanya aturan yang mengatur secara jelas bahwa masyarakat mendapatkan kesempatan dalam pembangunan dengan memberikan kesempatan bekerja apabila para investor berinvestasi di Natuna. Adapun Strategi Pemerintah Kabupaten Natuna dalam mewujudkan *Good Governance* yaitu melakukan Dialog Interaktif melalui Radio yang dilakukan setiap hari kerja yang digunakan sebagai media sosialisasi, diskusi uji publik terhadap beberapa kebijakan yang diimplementasikan, penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD maupun pemerintah eksekutif, terutama pada saat sosialisasi suatu kebijakan, optimalisasi dan pengembangan perusahaan daerah.

Strategi Pemerintah dalam mewujudkan *Good Governance* belum baik. Ini ditandai dengan kurangnya Sumber daya manusia yang berkualitas dan pemahaman para staf mengenai penyelenggaraan pemerintah masih sangat minim sehingga maksud penyelenggaraan pemerintah yang baik hanya di mengerti oleh segelintir atasan, diperlukan beberapa upaya untuk melakukan sosialisasi mengenai *Good Governance* Serta menumbuhkan kenedulian semua komponen masyarakat Natuna untuk memahami